

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Al Asy Ari Adnan Hakim<sup>1</sup> dan Raditya Sukmana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

Email: arhyian@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

**Abstrack**

*The purpose of this study is to examine and analyze the role of government as reflected in government spending in the education and health sectors to Human Development Index (HDI) in 16 OIC Countries. The data used in this study secondary data in the form of panel data conducted on 16 countries OKI in the period 2008 s/d 2011 which then analyzed with multiple linear regression analysis tools. The results showed that government expenditures in the education sector and government expenditures in the health sector had an insignificant negative effect on the Human Development Index (HDI) in 16 OIC States.*

**Key words:** *Government expenditures in the education sector, government expenditures in the health sector and Human Development Index (HDI)*

**Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah yang tercermin dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Negara OKI. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder berupa data panel yang dilakukan pada 16 negara OKI dalam kurun waktu 2008 s/d 2011 yang kemudian dianalisis dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Negara OKI.*

**Kata Kunci:** *Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

**A. Pendahuluan**

Salah satu wacana yang paling menarik dalam pembicaraan para ekonom adalah terkait dengan penciptaan bentuk negara kesejahteraan yang baik, khususnya dalam

mengatasi beberapa permasalahan sosial ekonomi. Sejak awal decade tahun 60-an sampai dengan decade tahun 90-an, konteks negara kesejahteraan telah mengalami pergeseran-pergeseran

paradigma, dimana negara kesejahteraan yang diidentikkan dengan paradigma pembangunan ekonomi pada awal decade tahun 60-an, lebih diorientasikan pada peningkatan produksi semaksimal mungkin dengan tujuan akhir adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi suatu negara.

Padahal pembangunan itu sendiri, secara hakikatnya bersifat multifimensional yakni tidak hanya meliputi pembangunan ekonomi melainkan juga mencakup perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap dan kualitas masyarakat atau dalam kata lain negara kesejahteraan tidak hanya mampu diukur dan dinilai kesejahteraannya hanya berdasarkan pada aspek ekonomi semata akan tetapi lebih luas dari itu yakni mencakup seluruh komponen-komponen dalam negara baik itu politik, sosial dan lain sebagainya. Sehingga pada awal decade 90-an, paradigma negara kesejahteraan yang tercermin dari paradigam pembangunan telah mengalami pergeseran dimana orientasi yang dijadikan tolak ukur dari kesejahteraan adalah dinilai pada aspek mutu modal manusia.

Menurut Oluwatobi dan Ogunrinola (2011 : 74) bahwa “modal manusia telah

diakui secara global, sebagai salah satu faktor utama yang bertanggung jawab terhadap kekayaan bangsa”. Semakin berkualitas modal manusia yang dimiliki oleh suatu negara maka semakin maju dan berkembang pula keadaan negara tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah kualitas modal manusia, maka semakin lambat pula perkembangan suatu negara.

Diuraikan pula menurut Sharif (2012 : 304) bahwa, konsep Islam tentang negara kesejahteraan berbeda secara fundamental dengan konsep negara kesejahteraan dalam konvensional. Dalam konsep kesejahteraan konvensional itu sendiri hanya menitik beratkan pada kesejahteraan materiil. Hal ini sangat berbeda, disebabkan karena konsep Islam itu bersifat komprehensif, yakni kesejahteraan yang dititik beratkan guna mencapai kesejahteraan total umat manusia, baik itu kesejahteraan materiil maupun kesejahteraan spiritual dan moral, atau dengan kata lain bahwa, konsep kesejahteraan itu bukan hanya berdasarkan nilai-nilai ekonomi semata melainkan pula tata nilai Islam dalam bidang spiritual, sosial dan politik. Rasulullah SAW mengemukakan bahwa, salah satu fungsi atau posisi dari pemerintah adalah sebagai wali bagi siapapun yang tidak punya wali,

yang artinya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap semua masyarakat yang membutuhkannya. Kesejahteraan materiil dimaksudkan yaitu kesejahteraan masyarakat yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar serta terlaksananya sebuah sistem jaminan sosial yang komprehensif, penegakan keadilan sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan spiritual yaitu, mencakup ditegakkannya sistem hidup Islami bagi kaum muslimin dan adanya kebebasan beragama sepenuhnya bagi non muslim.

Berdasarkan hal tersebut maka sejak tahun 1990, *United Nations Development Program* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator baru yang menggabungkan faktor ekonomi dan non-ekonomi yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dari sekedar GDP yaitu, *Human Development Index* (HDI) atau yang sering disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini meringkas tiga variabel kesejahteraan dalam sebuah indeks komposit tunggal. Variabel-variabel tersebut antara lain : umur panjang serta menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup/AHH), pendidikan (diukur dari tingkat

kemampuan baca tulis orang dewasa/AMH dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan antara penghasilan dan kesejahteraan.

Sejalan dengan perkembangan konsep pembangunan manusia maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia atas negara-negara ke dalam 3 kategori yaitu, kelompok IPM tinggi dengan nilai IPM 0,80 sampai 1, dan kelompok dengan IPM menengah dengan nilai IPM 0,51 sampai 0,79, sert kelompok IPM rendah dengan nilai IPM 0,0 sampai 0,50.

Menurut laporan dari UNDP Tahun 2009 s/d 2011 tentang nilai IPM di 16 negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) maka dapat terlihat bahwa dari kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai oleh 16 negara dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tersebut masih jauh dari kata unggul. Hal ini didasarkan atas pencapaian nilai IPM negara OKI yang menunjukkan bahwa

dalam pengelompokan peringkat IPM menengah atas hanya mampu dicapai oleh 3 negara yaitu Malaysia, Iran dan Azerbaijan, sementara itu untuk pengelompokan peringkat IPM menengah bawah hanya mampu dicapai oleh 6 negara yaitu Guyana, Tajikistan, Kirgiztan, Pakistan, Cameroon dan Indonesia.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara OKI**  
**Tahun 2009 s/d 2011**

Negara OKI	Tahun		
	2009	2010	2011
<b>Kelompok IPM Tinggi</b>			
-	-	-	-
<b>Kelompok IPM Menengah Atas</b>			
Malaysia	0,758	0,763	0,766
Iran	0,723	0,740	0,742
Azerbaijan	0,71	0,713	0,7
<b>Kelompok IPM Menengah Bawah</b>			
Guyana	0,624	0,629	0,633
Indonesia	0,611	0,62	0,624
Tajikistan	0,576	0,580	0,607
Kirgiztan	0,591	0,594	0,598
Pakistan	0,508	0,512	0,513
Cameroon	0,482	0,488	0,492
<b>Kelompok IPM Rendah</b>			
Togo	0,448	0,452	0,455
Uganda	0,445	0,450	0,454
Gambia	0,432	0,437	0,440
Chad	0,331	0,336	0,445
Mali	0,337	0,334	0,347
Guinea	0,341	0,342	0,344
Niger	0,297	0,298	0,289

*Sumber Data : UNDP, 2013*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat terlihat bahwa dari 16 negara OKI hanya terdapat 3 negara yang mampu masuk dalam kelompok IPM Menengah Atas, sedangkan sisanya yakni 13 negara lainnya masih belum mampu unggul dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini juga menjadi cerminan dasar bagi sebagian besar negara OKI yang menunjukkan suatu kondisi yang masih belum mampu dalam menciptakan konsep negara kesejahteraan yang utuh bagi negaranya. Menurut UNDP (1996) bahwa besarnya tingkat IPM yang dicapai oleh

suatu negara dapat dijadikan indicator untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Selain itu, tingkat IPM yang dicapai oleh suatu negara dapat digunakan untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa negara OKI tersebut, pada dasarnya disebabkan karena rendahnya komponen-komponen pembentuk IPM yang telah dicapai selama ini, dan hal ini tidak lepas pula dari adanya peran pemerintah dalam mendukung peningkatan komponen IPM seperti angka harapan hidup (AHH) yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan dan kemampuan daya beli masyarakat (pendapatan perkapita) untuk mengukur dimensi hidup layak.

Menurut Lilik (2008) bahwa tinggi rendahnya nilai IPM yang dicapai oleh setiap negara tentu tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan

kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Wolfson dalam Suparmoko bahwa, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan (Lilik, 2008).

Besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran pemerintah (*public*) yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Semakin besar alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatkan komponen-komponen pembangunan manusia, maka akan semakin meningkat pula pembangunan manusia pada suatu negara, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah mempunyai keterkaitan terhadap peningkatan IPM suatu Negara.

Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan Javar, Abbasian dan Sahar (2002) bahwa, terdapat korelasi positif antara pengeluaran kesehatan pemerintah terhadap IPM. Hasil temuan ini

mengindikasikan bahwa dengan adanya korelasi positif, menunjukkan besarnya peran pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur berdasarkan IPM atau dalam artian dengan adanya peningkatan dan adanya alokasi pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan peningkatan kualitas IPM yang semakin baik pula dalam suatu negara. Sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia diharapkan berujung pada peningkatan output perkapita dalam suatu masyarakat.

Penelitian serupa juga dikemukakan oleh Adi, Waridin, dan Johana (2011) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2008 di 35 Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di sektor public tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara simultan pengeluaran pemerintah dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan

kesehatan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Menurut laporan World Bank (2014) mengenai persentase pertumbuhan alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di 16 Negara OKI menunjukkan bahwa besaran persentase pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Negara OKI pada dasarnya sudah cukup baik, sebagai contoh Negara Gambia yang memiliki persentase pengeluaran pendidikan adalah sebesar 19,7 persen pada tahun 2011 dan sebesar 54,0 persen untuk persentase pengeluaran kesehatan. Persentase pengeluaran pemerintah tersebut pada dasarnya hampir sebanding atau bahkan melebihi jika dibandingkan dengan besaran persentase pengeluaran yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2011 besaran persentase pengeluaran pendidikan adalah sebesar 21,1 persen dan untuk kesehatan adalah sebesar 45,7 persen.

Sehingga berdasarkan hal ini, dapat dikemukakan bahwa adanya kondisi yang bertolak belakang antara besaran

pencapaian anggaran pemerintah dalam mendukung penciptaan pembangunan manusia yang berkualitas dan pencapaian pembangunan manusia itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah yang tercermin dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## B. Kajian Teoritis

### 1. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang lengkap karena mengandung peraturan hidup yang lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Islam menyeru ummatnya supaya maju dalam segala aspek kehidupan termasuk kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kewenangan. Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam seperti yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta para ulama dan sarjana dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh pemikiran ekonomi barat.

Pembangunan ekonomi dalam perspektif konvensional adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi berskala besar dan hal ini cenderung bersifat material semata. Sedangkan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam sebaliknya, dimana pembangunan dalam perspektif Islam lebih bersifat multidimensional yakni tidak hanya meliputi aspek material seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan lain sebagainya, akan tetapi mencakup pula pada aspek lainnya yaitu pembangunan manusia, pembangunan sosial, kebudayaan, serta yang terpenting adalah aspek spiritualnya.

Menurut teori ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa, konsep pembangunan ekonomi hanya dipacu pada aspek memaksimalkan keuntungan yang didukung oleh asumsi bahwa, perekonomian berada dalam keadaan persaingan sempurna dan tidak perlunya peran pemerintah yang cukup besar dalam mengatur sistem perekonomian. Sementara dalam sistem sosialis, pembangunan ekonomi dicirikan oleh kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan menentang adanya perbedaan kelas antar



masyarakat, sehingga hubungan ekonomi bukan lagi hubungan persaingan, tetapi kerja sama antar pelaku ekonomi. Sebaliknya konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah bersifat komprehensif yang tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi terangkum pada aspek moral dan sosial, material maupun spiritual.

Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam ialah pembangunan manusia itu sendiri, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan fiskal serta sosial budayanya. Ini berarti Islam menganggap manusia merupakan tempat atau fokus utama dari aktivitas pembangunan. Kesuksesan sebuah negara tidak hanya dilihat dari aspek nilai material akan tetapi lebih pada kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh yaitu, apakah masyarakat sudah berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan minimumnya, mampu menempuh pendidikan yang layak, memiliki kesehatan yang baik, memiliki fasilitas peribadatan yang baik, memiliki keamanan dan lain sebagainya. Dimana aspek-aspek ini sering kali terabaikan dalam konsep-konsep pembangunan ekonomi konvensional.

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat multidimensional yaitu pembangunan yang seimbang di antara faktor-faktor material dan kerohanian, kuantitatif dan kualitatif, dalaman dan luaran. Prinsip dinamik dalam kehidupan sosial Islam ialah memberikan penekanan yang istimewa kepada dua perkara ; *pertama*, penggunaan secara optimum sumber-sumber yang dikaruniakan oleh Allah S.W.T kepada manusia, *kedua*, penggunaan serta pemanfaatan sumber-sumber tadi secara adil dan merata.

Menurut Sharif (2012 : 31-39) bahwa terdapat 7 fokus tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam yaitu :

1. Pencapaian *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat.
2. Distribusi yang adil dan merata
3. Tersedianya kebutuhan dasar
4. Tegaknya keadilan sosial
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan
6. Pengembangan moral dan material
7. Sirkulasi Harta
8. Terhapusnya Eksploitasi

Kesejahteraan dan kebajikan serta *falah* yang ingin dicapai dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam bukan sekedar untuk memenuhi keperluan



duniawi semata-mata, tetapi juga kesejahteraan, kebajikan dan falah di akhirat dan antara keduanya tidak ada garis pemisah. Pembangunan merupakan yang berorientasikan kemaslahatan bersama dan nilai yang ditumpuhkan ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dalam semua dimensi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah untuk mencapai kebajikan, kesejahteraan dan *falah* duniawi dan ukharwi.

## 2. Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Islam merupakan kerangka acuan yang “*kaffa*”, dan mempunyai cakupan pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah tetapi juga *muamalat* (kehidupan sehari-hari), akidah dan syariah, kebudayaan dan peradaban. Islam tidak saja berkaitan dengan masalah akhirat, tetapi juga masalah duniawi, tidak hanya masalah keagamaan, tetapi juga masalah negara. Syariah dan pemerintah dua elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pemerintah adalah pemegang amanah Allah dalam menjalankan tugas-tugas kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata

kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara (*Daulah Islamiyah*) adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat.

Teks Al-Qur’an dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar. Peran-peran tersebut antara lain :

- a. Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik.
- b. Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik.
- c. Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah.
- d. Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya.
- e. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi

dan redistribusi kekayaan (pendapatan).

- f. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam (Tika, 2008 : 67).

Salah satu implementasi peran pemerintah yang berkaitan dengan sektor publik dan mengarah pada aspek kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal di dalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi (*as siyasatu al iqtisadi*) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana dikemukakan Abdurrahman Al Maliki dalam Tika (2008 : 68) yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasyah/ basic needs*) setiap individu secara menyeluruh dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya.

Islam memandang bahwa, kebijakan fiskal hanyalah salah satu mekanisme untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan

fiskal tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh mekanisme-mekanisme lainnya yang diatur melalui syariah Islam, seperti mekanisme kepemilikan, mekanisme pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan, dan mekanisme kebijakan ekonomi negara. Dengan kata lain, syariat Islam harus diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*) tanpa pilah-pilah (*parsial*) agar *shariah mechanism* dapat dengan sempurna mengatur distribusi ekonomi yang adil. Adapun peranan kebijakan fiskal sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan konsekuensi logis dari kewajiban syariat sebagai jawaban atas salah satu realitas yang menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai masalah “eksternalitas” dan “kegagalan pasar” (*market failure*).

Menurut Mannan, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara (Tika, 2008 : 68).

Kebijakan fiskal memiliki tiga instrumen yaitu *pertama*, kebijakan pendapatan, *kedua*, kebijakan belanja, *ketiga*, kebijakan hutang. Ketiga instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran negara.

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita. Anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan umat.

Secara konseptual jenis penerimaan pemerintah maupun dalam alokasi belanja pemerintah dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam hampir sama. Namun demikian, tujuan-tujuan yang ingin dicapai agak sedikit berbeda, mengingat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pengelolaan anggaran dalam Islam selalu diarahkan untuk menciptakan keadilan, sehingga dalam segala sesuatunya harus berdasarkan perintah Al-Qur'an dan Hadist (Sairi, 2005 dalam Tika, 2008 : 69).

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa, anggaran negara terdiri atas dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan penerimaan pemerintah diartikan sebagai upaya untuk menggali sumber-sumber pendanaan yang tidak membebani masyarakat. Kesuksesan Rasulullah SAW dalam memenuhi kebutuhan rakyat pada zamannya yaitu dengan berpedoman pada prinsip awal saling membantu terhadap kebutuhan saudaranya sehingga tidak ada yang merasa terzalimi jika salah satu warganya harus mengorbankan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat dan hasilnya mengalami kemajuan yang pesat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan penerimaan (pendapatan) anggaran tepat mampu berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan untuk keperluan administrasi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan (Sadono, 1994 dalam Tika, 2008 : 70). Selain untuk mewujudkan stabilitas perekonomian, pembelanjaan pemerintah ditunjukkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep

Islam bahwa, sisi pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Negara bertanggung jawab untuk melindungi agama warga negara, kehidupan, keturunan, dan harta milik.

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam memandu kebijakan pengeluaran pemerintah. Adapun kaidah-kaidah tersebut adalah :

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam mengikuti *masalahah*.
- b. Menghindari *mayaqqoh* kesulitan dan *mudharat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. *Mudharat* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari *mudharat* dalam skala umum.
- d. Pengorbanan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- e. Kaidah *Al giurmu bil gunmi* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin

beruntung harus siap menanggung kerugian).

- f. Kaidah *Ma la yatimmu al waajibu ila bihi fahua wajib* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa didukung oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut wajib hukumnya (Chapra, 2001 dalam Tika, 2008:71).

### C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang sudah melalui proses panel atau data panel (*pooled data*), yaitu gabungan data silang (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*) pada 16 negara OKI. Disebabkan karena adanya keterbatasan data yang diperoleh peneliti dari beberapa negara, maka peneliti hanya dapat melihat pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di 16 negara OKI, selain adanya pembatasan dalam jumlah negara yang digunakan, karena adanya keterbatasan data jumlah *time series* yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat *unbalance* yaitu, penggunaan periode data atas ketersediaan dalam kurun waktu 2008-2011. Semua data yang

digunakan bersumber dari laporan *word bank*, UNDP, *trading economic, index mundi, tranparency International* dan BPS.

Analisis yang digunakan untuk mengukur serta menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan atas IPM di negara OKI, dalam penelitian ini akan model analisis yakni regresi linear berganda. Analisis ini akan mengestimasi semua variabel-variabel bebas (X), sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel terkait (Y) dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Ln}y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + e$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X<sub>1</sub> = Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan (PPSP)

X<sub>2</sub> = Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (PPsK)

Ln = Logaritma Natural

e = eror

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat terlihat bahwa variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Sementara itu variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang diukur berdasarkan persentase dari total pengeluaran pemerintah atas sektor pendidikan dan kesehatan

Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM maka alat analisis yang digunakan adalah, Stata versi 11 guna mendapatkan nilai koefisien parameter masing-masing variabel, nilai R-Square, uji signifikan baik itu secara parsial maupun secara simultan, dan juga untuk melihat kekonsistenan model yang akan dibuktikan dengan beberapa model panel data serta dengan stata dapat juga diketahui ada tidaknya pelanggaran asumsi baik itu heterokedastis, multikolinearitas maupun autokorelasi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### I. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis model regresi linear berganda yang telah dilakukan guna

menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM di negara OKI, dapat terlihat disektor pendidikan ( $X_1$ ) dan pengeluaran pada tabel 1.1, sebagai berikut pemerintah disektor kesehatan ( $X_2$ )

Tabel 1.2  
 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda  
 Pengeluaran Publik Pendidikan dan Pengeluaran Publik Kesehatan Terhadap IPM  
 (pada  $\alpha = 0,05$ )

```
. xtdpdsys lhdi lpse lpsh, maxldep(2)
```

System dynamic panel-data estimation  
 Group variable: **code**  
 Time variable: **year**

Number of obs = **44**  
 Number of groups = **16**  
 obs per group: min = **2**  
 avg = **2.75**  
 max = **3**

Number of instruments = **8**      wald chi2(3) = **824.89**  
 Prob > chi2 = **0.0000**

One-step results

	lhdi	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
lhdi	lhdi					
L1.		<b>1.003605</b>	<b>.0433052</b>	<b>23.18</b>	<b>0.000</b>	<b>.9187287 1.088482</b>
lpse		<b>-.0006855</b>	<b>.0156671</b>	<b>-0.04</b>	<b>0.965</b>	<b>-.0313926 .0300215</b>
lpsh		<b>-.0176001</b>	<b>.0333601</b>	<b>-0.53</b>	<b>0.598</b>	<b>-.0829847 .0477845</b>
_cons		<b>.078003</b>	<b>.1158921</b>	<b>0.67</b>	<b>0.501</b>	<b>-.1491414 .3051473</b>

Instruments for differenced equation  
 GMM-type: **L(2/3). lhdi**  
 Standard: **D. lpse D. lpsh**

Instruments for level equation  
 GMM-type: **LD. lhdi**  
 Standard: **\_cons**

Bertitik tolak pada hasil estimasi sebagaimana yang terlihat dalam data table 1.2 ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan ( $X_1$ ) dan pengeluaran pemerintah disektor kesehatan ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh negative tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Negara OKI. Hal ini berarti bahwa semakin besarnya pengeluaran yang disalurkan pemerintah dalam sektor pendidikan

maupun sektor kesehatan maka akan berdampak terhadap semakin menurunnya pencapaian IPM suatu negara.

## 2. Pembahasan Hasil Penelitian

Keberhasilan pembangunan manusia disuatu negara termasuk negara OKI. sangat ditentukan oleh seberapa besar peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunannya disektor pendidikan dan kesehatan maupun ekonomi. Besarnya peran pemerintah

dinegara OKI terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia (*Human Development*) dapat dilihat dari nilai IPM yang telah dicapai oleh negara tersebut selama periode tertentu, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang diukur dengan tingkat rata-rata lama sekolah penduduk, Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) maupun pendapatan perkapita penduduk negara tersebut.

Berdasarkan hasil analisis secara statistik diperoleh informasi bahwa, hubungan antara pengeluaran pemerintah disektor pendidikan (X1) dan pengeluaran pemerintah disektor kesehatan (X2) terhadap kualitas pembangunan manusia (IPM) yang telah dicapai oleh negara OKI pada periode tertentu merupakan hubungan yang negatif tidak signifikan. Temuan ini mengandung makna bahwa, peran pemerintah melalui alokasi anggaran pengeluaran disektor pendidikan dan disektor kesehatan justru berdampak negatif dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di negara OKI.

Padahal secara konseptual dikatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia maka diperlukan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunannya disektor

pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Brata (2005) menyatakan bahwa, pengeluaran pemerintah, investasi dan distribusi pendapatan sebagai determinan pembangunan manusia. Menurut Stephen (2011) bahwa pada kondisi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung modal pembangunan manusia dan diperlukan adanya penyaluran belanja modal negara pada sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan modal pembangunan manusia dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Konsep mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dengan kualitas pembangunan manusia (IPM) telah dibuktikan oleh beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa, pengeluaran pemerintah untuk sector pelayanan sosial dan tingkat pendidikan terbukti mempunyai peran penting sebagai penghubung yang menentukan kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Ramirez, 1998). Sedangkan Ginting (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan terhadap pembangunan manusia. Hasil penelitian lainnya menemukan bahwa, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh



signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Brata, 2005; Patta, 2012).

Diuraikan pula Tjiptoherijanto (1989) bahwa, kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia di suatu negara menurut konsep UNDP dapat dilihat besarnya IPM yang telah dicapai oleh suatu negara pada periode tertentu. Kemudian dalam konsep teoritis dikatakan bahwa kualitas pembangunan manusia (IPM) disuatu negara dapat ditingkatkan sangat tergantung pada peran pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran disektor pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Stephen (2011) bahwa pada kondisi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada modal pembangunan manusia dan diperlukan adanya penyaluran belanja modal negara pada sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan modal pembangunan manusia dan berakhir pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian juga yang dikemukakan oleh Brata (2005) bahwa, pengeluaran pemerintah, investasi dan distribusi pendapatan sebagai determinan pembangunan manusia.

Jika hasil penelitian ini dihubungkan dengan konsep teori yang dan hasil kajian terdahulu maka dapat dikatakan bahwa, temuan dalam penelitian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan disektor kesehatan mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap peningkatan pembangunan manusia (IPM) merupakan hasil temuan yang bertentangan dengan konsep yang mendasarinya, bahkan cenderung memperlemah dukungunya terhadap konsep yang telah dikemukakan pada uraian diatas. Temuan ini juga sekaligus menolak hasil kajian terdahulu yang menyatakan bahwa, pengeluaran pemerintah disektor pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian inipun menolak hipotesis yang telah dikemukakan oleh peneliti dalam uraian sebelumnya.

Meskipun secara konseptual dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan semestinya dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan pembangunan manusia, namun dalam hasil penelitian menemukan bahwa, pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan

kesehatan berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia (IPM) dinegara OKI. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan kedua variable amatan tersebut, sehingga mengakibatkan adanya efek negatif pada IPM. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

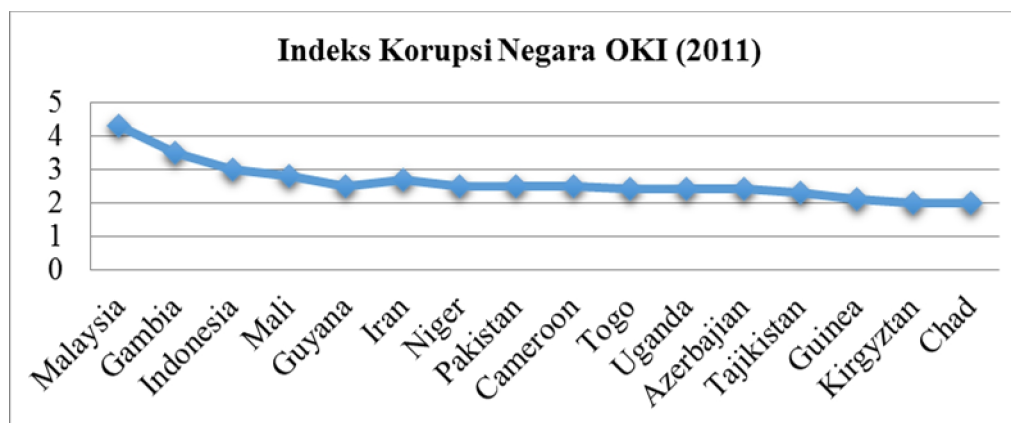
- a. Permasalahan di sektor pendidikan yang berdampak terhadap IPM di Negara OKI

*Pertama*, disebabkan dari buruknya sistem pendidikan yang berlaku dan tidak efektifnya alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan. Seperti pada kasus Indonesia mengenai alokasi anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan yang saat ini sepenuhnya masih tercampur dengan alokasi anggaran untuk gaji guru, sehingga menyebabkan besaran persentase yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap belanja pemerintah disektor pendidikan relatif sangat kecil, dan cenderung hanya berapa persen saja dari alokasi anggaran pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai subsidi dibidang pendidikan.

Berdasarkan laporan Nota Keuangan APBN disebutkan bahwa besaran alokasi

anggaran pendidikan pada Depdiknas yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebesar Rp2,2 triliun. Sementara dalam rangka peningkatan pemerataan dan perluasaan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, anggaran pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di prioritas atas 8 program 2 diantaranya adalah (a) subsidi tunjangan fungsional guru non PNS jenjang pendidikan dasar dengan besar anggaran sebesar Rp836,0 miliar dan (b) tunjangan profesi guru pendidikan dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,3 triliun.

Selain itu adanya ketidaefektifan alokasi anggaran pendidikan pemerintah terhadap IPM ini, dimungkinkan karena buruknya sistem pemerintahan dari negara-negara itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan tingginya angka korupsi. Sebagaimana yang dikemukakan dalam laporan *Transparency International* (2011) pada gambar 1, menunjukkan bahwa secara keseluruhan hampir disemua negara OKI memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan bahkan secara rata-rata tingkat pencapaian indeks korupsi dari negara OKI hanya sebesar 2,55 pada tahun 2011.



Sumber data : *Transparency International, 2011*

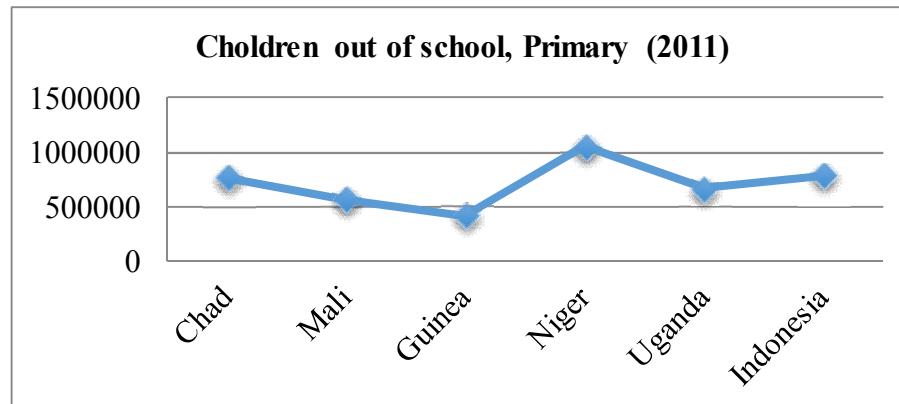
Gambar 1  
Indeks Korupsi Negara OKI Period 2011

Lebih lanjut dikemukakan pula dalam laporan *Global Corruption Report : Education* (2010) mengenai beberapa tindak korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan di beberapa negara OKI, seperti dinegara Cameroon dan Pakistan yang berdasarkan hasil survei menunjukkan sebesar 43% dan 72% penilaian masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ada dikedua negara itu cukup buruk atau sangat korup. Sementara itu hal serupa juga terjadi di beberapa negara seperti di Indonesia, Uganda, Mali dan Togo dimana adanya kecenderungan tindak korupsi terjadi pada sisi program pendidikan gratis pemerintah dan korupsi pada sistem manajemen sekolah (seperti penggunaan ijazah palsu baik untuk siswa maupun untuk guru di Niger) dan (ketidakhadiran guru di

sekolah dasar yang secara rata-rata 15% dari keseluruhan guru di Cameroon).

Ketiga, belum terealisasinya program-program pendidikan pemerintah secara akurat atau tepat sasaran, yang diakibatkan adanya tindak korupsi yang terjadi pada sisi anggaran pendidikan. Seperti program pendidikan pemerintah berupa : program pendidikan usia dini, subsidi pendidikan atau bantuan pendidikan bagi yang tidak mampu, wajib belajar 9 tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan tinggi, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan program pendidikan non formal. Hal ini sejalan dengan laporan *World Bank* (2011) mengenai *Children out of school primary* pada gambar 2, yang menunjukkan masih

tingginya jumlah anak usia sekolah dasar yang tidak terdaftar atau tidak bersekolah.



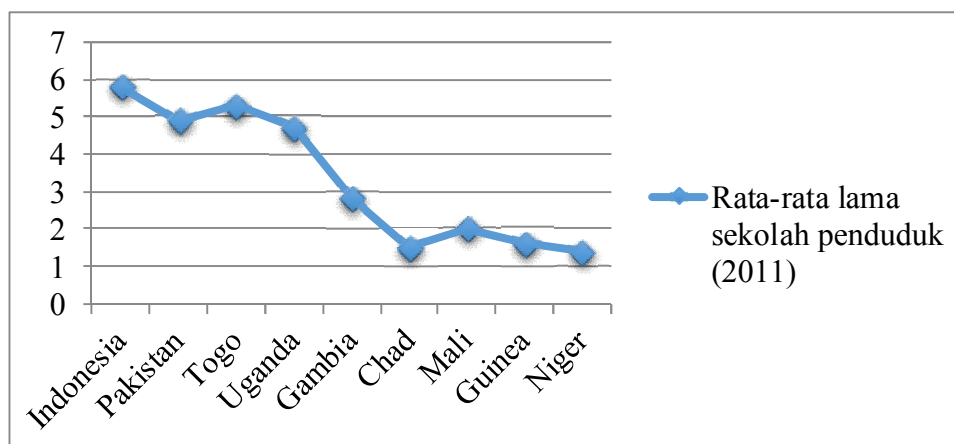
Sumber data : World Bank, 2011

Gambar 2

Children Out Of School Primary

Selain dari laporan *World Bank*, uraian tersebut dikemukakan pula dalam laporan UNDP (2011) pada gambar 3 mengenai tingkat pencapaian rata-rata lama sekolah berdasarkan kelompok IPM menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan, khususnya bagi negara-negara yang berada

pada kelompok IPM menengah bawah seperti : Indonesia dan Pakistan, serta bagi negara-negara yang berada pada kelompok IPM rendah seperti Togo, Uganda, Gambia, Chad, Mali, Guinea dan Niger memiliki tingkat pencapaian rata-rata lama yang masih tergolong rendah.



Sumber data : UNDP, 2011

Gambar 3

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Negara OKI Periode 2009-2011

Menurut Nabil (2000) dalam penelitiannya berjudul “*Eradication of poverty in the last developed and low-income OIC member countries*”, bahwa kemiskinan pada dasarnya telah menyebar jauh dan luas di negara-negara Islam terlepas dari kenyataan bahwa hal ini tidak sepadan dengan kekayaan sumberdaya yang dimiliki oleh negara-negara itu sendiri. Dampaknya berada dalam skala besar mencakup fenomenama struktural sumberdaya manusia, seperti buta huruf, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, rendahnya kualitas kesehatan masyarakat disebabkan adanya kegagalan strategi pembangunan khususnya dalam bidang reformasi makro ekonomi. Dimana kegagalan ini terwujud pada aspek adanya ketimpangan distribusi pendidikan dalam masyarakat yang sampai saat ini masih berlangsung. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri pula jika pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut tidak memiliki peningkatan yang signifikan.

Bahar (2004) dalam penelitiannya berjudul “*Human resource development in OIC countries : Challenges and Setback*” mengemukakan bahwa negara-negara OKI

saat ini masih memiliki kelemahan dalam kinerja yang berkaitan dengan elemen pembangunan manusia, baik itu pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat yang mana memberikan efek yang saling berkaitan antara satu sama lain. Seperti halnya masih rendahnya kualitas gizi masyarakat di negara OKI yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan kognitif dan kinerja sekolah anak.

Selanjutnya dikemukakan bahwa saat ini negara-negara OKI pada dasarnya telah berhasil membuat kemajuan yang cepat dan berkelanjutan di wilayah mereka sendiri, dari memperluas pengetahuan, peningkatan standar hidup dan peningkatan harapan hidup. Akan tetapi hal ini belum mampu memberikan peningkatan yang signifikan terhadap pembangunan manusia, disebabkan oleh adanya permasalahan peningkatan kemiskinan yang masih menjadi kendala besar bagi mereka.

Temuan dalam penelitian ini jarang ditemukan, namun ada peneliti yang telah melakukan penelitian dan sekaligus memberi dukungan yaitu, Andew dan Vinaya (2007) dalam penelitiannya mengenai keterkaitan antara peran pemerintah yang diukur oleh tingkat

korupsi dan kualitas birokrasi dalam menentukan keefektifan belanja publik untuk meningkatkan pembangunan modal manusia pada 91 negara berdasarkan laporan *word bank* periode 1990, 1997 dan 2000. Penelitian ini menunjukkan adanya temuan yang mengejutkan pada belanja publik yaitu, sering kali tidak menghasilkan peningkatan yang diharapkan, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan modal manusia. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa negara yang dinilai memiliki tingkat persentase korupsi yang tinggi atau dinilai memiliki birokrasi yang tidak efektif karena sistem tata kelola birokrasi yang buruk, sehingga belanja publik memiliki dampak negatif. Hasil penelitian tersebut sejalan hasil laporan *transparency international* mengenai tingkat persentase korupsi di seluruh negara sebagaimana pada gambar 5.5 yang menunjukkan bahwa, mayoritas dari negara-negara OKI baik itu Malaysia, Gambia, Indonesia, Mali Guyana, Iran dan beberapa negara OKI lainnya memiliki tingkat persentase korupsi yang cukup tinggi, dimana tingkat pencapaian nilai korupsinya masih berada pada nilai kurang dari 4, dalam artian masih tingginya persentase korupsi yang

terjadi. Hasil laporan ini menunjukkan bahwa 4 negara OIC, dapat dinilai memiliki birokrasi yang tidak efektif, dikarenakan adanya tata kelola yang buruk dalam pemerintahannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Swaha dan Sarika (2010) ini, memperkuat alasan peneliti sebelumnya mengenai ketidaksesuaian alokasi anggaran belanja publik pemerintah terhadap peningkatan IPM, disebabkan adanya kecenderungan yang terjadi pada beberapa negara OIC, seperti halnya Indonesia dan Malaysia sampai saat ini lebih memiliki kecenderungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan dalam *human development*.

b. Permasalahan di sektor kesehatan yang berdampak terhadap IPM di Negara OKI

*Pertama*, terkait dengan adanya sistem pemerintahan yang dengan korupsi. Sehingga dapat dimungkinkan terjadinya alokasi anggaran pemerintah disektor kesehatan masih belum tepat sasaran. Lebih lanjut, dikemukakan pula dalam Laporan *Global Corruption Report*, (2006) bahwa tindak korupsi yang terjadi di beberapa negara disebabkan karena :

- Ketidakseimbangan informasi yang berlaku dalam sistem kesehatan, antara petugas kesehatan dan pejabat publik.
- Ketidakpastian dipasar kesehatan, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya, pemantuan, pengukuran, pemberian kesehatan, dan desain rencana asuransi.
- Kompleksitas sistem kesehatan

Sehingga, berdasarkan hal ini dapat dimungkinkan bahwa pengeluaran kesehatan pemerintah yang pada dasarnya ditunjukkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat menjadi kurang efektif, khususnya pada aspek program-program kesehatan pemerintah menjadi tidak terlaksana secara baik yaitu seperti (a) ketersediaan, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua masyarakat, (b) pelayanan kesehatan gratis (c) bantuan di bidang promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengobatan penyakit dan rehabilitasi, dan (d) mobilitas dan mendukung masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi kesehatan.

*Kedua*, disebabkan oleh faktor lingkungan dan aspek kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang

kita ketahui bahwa alokasi anggaran pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan yaitu dengan memperpanjang angka harapan hidup dari masyarakat. Jika dilihat dari besarnya alokasi anggaran pemerintah di sektor kesehatan dapat terbilang cukup berhasil dalam memfalisitasi masyarakatnya dengan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan adanya beberapa dukungan dalam bentuk kebijakan-kebijakan internal dari negara-negara OKI yang mendukung dalam meningkatkan pembangunan manusia. Akan tetapi hal tersebut masih dianggap bahwa peran pemerintah di negara OKI dinyatakan belum mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan manusia (IPM), disebabkan karena pengaruh kondisi sosial masyarakat yang tidak memperdulikan aspek kesehatan, khususnya dalam pola konsumsi masyarakat dan pola hidup masyarakat itu sendiri.

Hasil ini sejalan dengan perkembangan pola konsumsi masyarakat yang mana dalam pengkonsumsian makanannya lebih



cenderung pada berbagai makanan-makanan yang sifatnya instan dibandingkan makanan-makanan organik. Sehingga secara sadar atau tidaknya makanan instan tersebut tetap akan berdampak terhadap buruknya kesehatan yang pada akhirnya berdampak terhadap semakin pendeknya usia harapan hidup seseorang.

Menurut laporan European Environment Agency (EEA) dan Joint Research Centre (2013) yang berjudul “*Environment and Human Health*”, menyatakan bahwa adanya risiko kesehatan masyarakat yang baru muncul dari produk, bahan kimia, kondisi lingkungan serta perubahan gaya hidup masyarakat. Risiko kesehatan tersebut muncul dari penyakit tidak menular (*non-communicable diseases*) seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, diabetes dan kanker yang mana akan memicu peningkatan angka kematian prematur. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, “Penduduk terus terpapar berbagai risiko lingkungan dan kesehatan yang akan mengurangi tingkat harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat”.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengeluaran pemerintah di sektor

pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara OKI, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut : “Ditemukan adanya pengaruh negatif tidak signifikan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Negara OKI. Hal tersebut dimungkinkan terjadi, karena adanya beberapa permasalahan yaitu sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang masih buruk dikarenakan tingginya angka korupsi, belum terealisasinya program pendidikan dan program kesehatan secara menyeluruh dan tepat sasaran serta masih besarnya ketimpangan yang terjadi dalam pengalokasian anggaran pemerintah terhadap masyarakat”.

### Daftar Pustaka

Adi, Waridin dan Johana, 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 1, No. 1, pp 25-42.

- Andrew, Sunil, Rajkumar., Vinaya, Sworop, 2007. *Public Spending and Outcomes : Does Governance Matter?.* Journal of Development Economics. Hlm : 96-111.
- Bahar, 2004. *Human Resource Development in OIC Countries Challenges and Setbacks.* Journal of Economic Cooperation, 25. 1. pp : 37-70.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia dan Kemiskinan.* Yogyakarta. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- EEA Report, 2013. *Environment and Human Health.* Report UER, No. 5.
- Ginting, C. K., 2008. *Analisis Pembangunan manusia di Indonesia.* Tesis magister, Sekolah Pascasarjana. Universitas Sumatra Utara. Medan
- Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007, Katalog BPS, 4102002.
- Javar, Razmi Mohammad. Abbasian, Ezatollah dan Sahar Mohammadi, 2002. *Investigatinjg The Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran.* Issue 5, Oktober.
- Lilik, Rahmawati, 2008. *Kebijakan Fiskal dalam Islam.* Jurnal Al-Qanun, Vol. 11, No. 2, pp 429-452.
- Nabil, Md. Dabour, 2000. *Eradication of Poverty in the Least Developed and Low-Income OIC Member Countries.* Journal of Economic Cooperation. pp : 57-96
- Oluwatobi, Stephen O and Ogunrinola, I Oluranti, 2011. *Government Expenditure on Human Capital Development Implications for Economic Growth in Nigeria.* Journal of Sustainable Development, Vol. 4 No, 3, Pp 72-80
- Patta d., 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2010-2011.* Tesis Master Universitas Hasanudin Makassar.
- Ramirez, A.,G., Ranis, dan F. Steward 1998, *Economic Growth and Humand Capital.* QEH Working Paper No. 18.
- Sharif, Chaudry Muhammad, 2012. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar).* Jakarta. Kencana.
- Stephen, O, Oluranti, I, 2011. *Government Expenditure on Human Capital Development : Implications for Economic Growth in Negeria.* Journal of Sustainable Development, Vol 4. No 3.
- Swaha, Shome and Sarika, Tondon, 2010. *Balancing Human Development With Economic Growth : A Studi of Asean 5.*

- Annals of the University of Petrosani, Economics, 10(1), pp 335-348.
- Tika, Widiastuti, 2008. *Dampak Korupsi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Beberapa Negara Muslim*. Tesis, Ekonomi dan Keuangan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- [www.kemenkeu.go.id/sites/default/.../NK%20RAPBN%202015%20web.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/.../NK%20RAPBN%202015%20web.pdf)
- [www.globalcorruptionreport.org](http://www.globalcorruptionreport.org)
- [www.moe.go.th/moe.html](http://www.moe.go.th/moe.html)
- [www.planipolis.iiep.unesco.org/](http://www.planipolis.iiep.unesco.org/)
- [www.transparency.org/](http://www.transparency.org/)
- [www.undp.org/](http://www.undp.org/)
- [www.unicef.org/malaysia/](http://www.unicef.org/malaysia/)
- [www.who.int/](http://www.who.int/)
- [www.worldbank.org/](http://www.worldbank.org/)
- [www.whothailand.healthrepository.org/](http://www.whothailand.healthrepository.org/)
- [www.whosrilanka.healthrepository.org/](http://www.whosrilanka.healthrepository.org/)
- [www.wpro.who.int/.../Malaysia Health Systems.org/](http://www.wpro.who.int/.../Malaysia_Health_Systems.org/)